

## Potret Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Ahmadiyah di Media Online

Siti Khodijah Nurul Aula

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [siti.aula@uin-suka.ac.id](mailto:siti.aula@uin-suka.ac.id)

### Abstract

This study analyzes a collection of news from online mass media related to the violence experienced by Ahmadiyah in the last 10 years in the mass media. Stigma about Ahmadiyya which is subject to persecution and discrimination from irresponsible elements. Reporting in the mass media in addition to providing updated information, on the other hand also provides a social deterrent effect that prevents such incidents from happening again. There are two problems that will be raised in this research, (1) How does the media portray the persecution-discrimination experienced by Ahmadiyah in Indonesia? (2) To what extent has the news coverage in the media influenced the reduction of persecution and discrimination against Ahmadiyah? The collected data is then analyzed with one of the theories about the five functions of the media including surveillance, interpretation, linkage, transmission of values, and entertainment in order to see the extent of the conflict. that occurred and efforts to break the chain of violence in the Ahmadiyah case. This study concludes that the news in the mass media that is transmitted on social media does not have a significant impact in reducing cases of violence against the Ahmadiyya group. The mass media provide benefits in terms of publication and dissemination of information, but do not have a direct effect on conflict resolution. Conflict resolution in the Ahmadiyah case still requires encouragement from legal regulations and awareness of religious community members.

**Keyword:** *Mediatization, Ahmadiyah, Violence and Mass Media*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis kumpulan berita dari media massa *online* terkait kekerasan yang dialami Ahmadiyah selama 10 tahun terakhir di media massa. Stigma tentang Ahmadiyah yang menjadi langganan persekusi hingga diskriminasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemberitaan di media massa selain memberikan perbaharuan informasi, di lain sisi juga memberikan efek jera-sanksi sosial yang membuat kejadian tersebut tidak terulang lagi. Terdapat dua masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, (1) Bagaimana gambaran media memotret persekusi-diskriminasi yang dialami oleh Ahmadiyah di Indonesia? (2) Sejauhmana pemberitaan di media mempengaruhi penurunan persekusi-diskriminasi terhadap Ahmadiyah?. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan salah satu teori tentang lima fungsi media meliputi pengawasan (*surveillance*), penafsiran (*interpretation*), Pertalian (*linkage*), penyebaran nilai-nilai (*Transmission of Value*), dan hiburan (*entertainment*) guna melihat sejauh mana kedalaman konflik yang terjadi dan upaya pemutusan mata rantai kekerasan dalam kasus Ahmadiyah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberitaan di media massa yang diteruskan di media sosial tidak memiliki dampak yang signifikan dalam penurunan kasus kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah. Media massa memberikan manfaat dalam dalam hal publikasi dan penyebaran informasi, akan tetapi tidak secara langsung memberikan efek pada resolusi konflik. Resolusi konflik dalam kasus Ahmadiyah



masih membutuhkan dorongan dari kebijakan-peraturan hukum dan kesadaran warga masyarakat beragama.

**Kata Kunci:** *Mediatisasi, Ahmadiyah, Kekerasan dan Media Massa*

## **PENDAHULUAN**

Kelompok keagamaan Ahmadiyah telah lama eksis dan berkembang di Indonesia. Awal masuk Ahmadiyah di Indonesia masih menjadi perdebatan, beberapa berita yang berhubungan dengan Ahmadiyah sudah mulai masuk ke beberapa buku dan majalah yang terbit di luar negeri sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamka, dan tidak terkecuali di Indonesia. Pendiri Ahmadiyah Cabang Lahore di Indonesia menjelaskan bahwa ia mendengar bahwa kehadiran Ahmadiyah di sekitar tahun 1921-1922 M. Pernyataan tersebut terbantahkan dengan pernyataan kehadiran Ahmadiyah pada 1918 M di Majalah *Islamic Review* edisi melayu yang terbit di Singapura, dan pada tahun 1920 Ahmadiyah mendatangkan tokohnya ke Indonesia yaitu Prof. Dr. Maulana H Kwadjah Kamaluddin, B.A., LLB pada tahun 1925-1950 M. Gambaran tersebut menjadi bukti nyata bahwa keberadaan Ahmadiyah di Indonesia telah ada sejak lama, dan eksistensinya masih cukup kuat hingga saat ini.

Kelompok Ahmadiyah beberapa kali mengalami persekusi dan diskriminasi di Indonesia. Peristiwa tahun 2011 di Cikeusik, Padeglang, Banten menjadi kejadian awal yang membuka mata publik. Penyerangan lokasi Ahmadiyah di Desa Umbalan tersebut memakan korban enam orang, kerusakan mobil, dan rumah warga. Peristiwa tersebut merupakan awal, dan dilanjutkan dengan berbagai peristiwa-peristiwa di berbagai kota di Indonesia. Beberapa peristiwa kekerasan terhadap Ahmadiyah diantaranya: Insiden Monas (2008), pengusiran dan penyerangan di NTB (2001 dan 2018), Penyegehan Masjid Jamaah Ahmadiyah di Bogor (2011), Pengusiran di Bangka (2016), Pengusiran di Kendal (2016), oknum FPI kepong rumah di Tebet, Jakarta Selatan (2015).<sup>1</sup> Peristiwa Cikeusik menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk melihat kembali beberapa diskriminasi dan kekerasan yang diterima kelompok Ahmadiyah.

Setiap peristiwa yang terjadi kepada Ahmadiyah senantiasa menjadi tajuk utama di media massa, serta diikuti dengan kecaman berbagai pihak atas tindakan kekerasan yang terjadi. Peristiwa yang dialami oleh kelompok muslim minoritas lebih menarik *headline* media massa, sebagaimana

---

<sup>1</sup> "Deretan Penyerangan Terhadap Ahmadiyah, Cikeusik Hingga NTB," CNN Indonesia, 2021.

yang terlihat dari kasus Jamaah Tabligh di masa Covid 19.<sup>2</sup> Wakil Presiden Ma'ruf Amin salah satu yang mengecam tindakan perusakan masjid yang dilakukan di Desa Balai Harapan, Sintang yang terjadi di akhir bulan ini. Beberapa kelompok dan masyarakat seperti SETARA Institute, Gusdurian, LPSK, Alisha Wahid, juga mengutuk keras peristiwa yang menimpa Ahmadiyah. Media juga memberitakan berbagai kecaman, reaksi, proses advokasi, dan proses penyelesaian kasus, dan dengan mudah dapat diakses serta dibaca masyarakat luas. Walaupun mendapatkan pemberitaan yang masif, peristiwa persekusi dan diskriminasi yang dialami Ahmadiyah di Indonesia tidak kunjung membaik. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang dialami kelompok Ahmadiyah dari era tahun 2000-an hingga sekarang. Walaupun tidak memiliki jamaat yang banyak, kelompok Ahmadiyah senantiasa mampu menyebarkan ajarannya ke penjuru dunia dan masih berkembang. Hal ini merupakan perjuangan luar biasa, terlebih dengan berbagai persekusi yang diterima dari awal berdiri hingga hari ini, bahkan di tengah pandemi Covid 19 seperti kelompok Ahmadiyah di Jawa Barat masih menerima berbagai bentuk persekusi.<sup>3</sup>

Penelitian ini ingin melihat gambaran media dalam memotret persekusi dan diskriminasi yang dialami oleh Ahmadiyah di Indonesia melalui gambaran media massa. Media massa yang dipilih adalah media massa *online* kompas.com dan detik.com, karena kedua media tersebut memiliki pengikut yang banyak dan kredibilitas berita yang lebih akurat dibandingkan beberapa media lain. Sejauhmana pemberitaan di media mempengaruhi penurunan persekusi dan diskriminasi terhadap Ahmadiyah baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini akan melihat lebih jauh fungsi media massa *online* sebagai pengontrol masyarakat terlihat dalam kasus kelompok Ahmadiyah, sebagai salah satu kelompok muslim minoritas di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA: SEBUAH PEMETAAN ATAS LITERATUR**

Media massa merupakan bagian dari alat dan sarana dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Media massa sering dimaknai sebagai media untuk berkomunikasi dan memberikan informasi melalui penyebaran secara massal serta dapat dijangkau oleh masyarakat banyak, secara makna media massa digunakan untuk menyebarkanluaskan isi berita, opini, komentar, hiburan, dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Perbedaan ini terlihat signifikan ketika dibandingkan dengan dunia literatur, literatur berangkat dari realitas teks yang senantiasa berkembang dalam merespon sebuah

---

<sup>2</sup> Siti Khodijah Nurul Aula, "Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 1 (2020): 125–48.

<sup>3</sup> Machasin Dkk, *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer*, ed. Muhammad Wildan (Yogyakarta: Tim Adab Press, 2020). 194

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi, Komunikasi Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.). 72.

kejadian.<sup>5</sup> Di sisi lain, media merupakan alat atau sarana untuk menyampaikan pesan komunikator pada khayalak, dan pengertian media massa alat sendiri merupakan alat untuk menyampaikan pesan yang berasal dari sumber pesan pada khayalak menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.<sup>6</sup>

### **Realitas Ahmadiyah di Indonesia**

Keberadaan Ahmadiyah di Indonesia memiliki sejarah dan dinamika yang panjang. Di dalam tiga dekade terakhir, keberadaan Ahmadiyah menjadi kontroversi dalam konteksnya sebagai organisasi keagamaan dengan Fatwa MUI tahun 1998 dan 2005. Keberadaan kedua fatwa tersebut penuh dengan pro dan kontra, terlebih masa tersebut sangat kental dengan nuansa politik setelah turunnya rezim orde baru.<sup>7</sup> Di sisi lain Indonesia senantiasa terbuka mengikuti situasi dan kejadian keamanan dunia. Indonesia telah mengikuti dan mendukung kebebasan beragama dari *International Covenant Of Civil and Political Rights* (ICCPR), serta telah termaktup dalam UUD 1945. Meskipun masih adanya kegagalan beberapa pihak dalam menjamin kebebasan dalam beragama di Indonesia. Kekerasan yang diterima oleh JAI merupakan wujud ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin keamanan Ahmadiyah, terlebih keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang semakin memperarah situasi yang ada. Muhammad As'ad dalam penelitian menyatakan bahwa penerbitan SK tidak didasarkan pada kebutuhan akan dasar hukum, melainkan sebuah sarana menyenangkan beberapa kelompok radikal keagamaan lain.<sup>8</sup>

Jamaah Ahmadiyah memiliki wadah organisasi di bawah nama Jemaat Ahmadiyah Indonesai (JAI). Uwes Fatoni telah melakukan penelitian etnografi terkait respon da'i terhadap gerakan jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di beberapa area di Tasikmalaya. Selama proses penelitian ditemukan dua kegiatan dakwah yaitu: dakwah defensif yaitu bertahan dan dakwah ofensif atau aktif. Lebih lanjut, di dalam melakukan dakwah aktif mereka melakukan empat strategi: *Pertama, dakwah bil hikmah* yang dilakukan dengan kata-kata maupun perbuatan yang bernilai Islami. *Kedua, dakwah bil mauidhatil hasanah* yang dilakukan dengan memberikan nasehat dan sosialisasi.

---

<sup>5</sup> Siti Khodijah, "Lembaran Akomodasi Dan Intoleransi: Relasi Antar Iman Dalam Literatur Keislaman Di Indonesia," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2019): 323, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2018.0202-10>.

<sup>6</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 123 dan 126.

<sup>7</sup> Ismatu Ropi, "Islamism, Government Regulation, and the Ahmadiyah Controversies in Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 48, no. 2 (December 2010): 281, <https://doi.org/10.14421/AJIS.2010.482.281-320>.

<sup>8</sup> Muhammad As'ad, "AHMADIYAH AND THE FREEDOM OF RELIGION IN INDONESIA," *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 3, no. 2 (December 2009): 390, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.2.390-413>.

*Ketiga, dakwah bil mujadalah* melalui dialog dan berdebat. *Keempat, dakwah bil hal* melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).<sup>9</sup>

Kelompok Ahmadiyah sering mendapatkan diskriminasi dan kekerasan. Abdul Gaffar telah melakukan penelitian terkait kekerasan yang diterima oleh Jemaat Ahmadiyah dari apatur melalui aparat represif seperti polisi dan militer ataupun aparat ideologis seperti MUI serta masyarakat di dua lokasi meliputi: Surabaya, Jawa Timur dan Lombok, NTB. Penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa negara melakukan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2011 Pemerintah Jawa Timur membuat kegiatan Ahmadiyah tersendat, terlebih setelah adanya Fatwa MUI yang membuat gerak Jamaah Ahmadiyah menjadi terbatas khususnya di Surabaya. Salah satu gambaran lain dari kurangnya penegakan hukum kepada para pelaku kekerasan terhadap Jamaah Muslim Ahmadiyah Lombok, beberapa Jamaah Muslim Lombok juga mengungsi selama tujuh tahun setelah diusir dari kampung mereka di desa Gegerung, Kecamatan Lingsar Lombok Barat ke kost tempat transit di Kota Mataram, NTB.<sup>10</sup> Lukman Nul Hakim juga melakukan penelitian kekerasan atas Jamaah Ahmadiyah dari perspektif psikologi sosial, dan melihat lebih jauh bagaimana proses sikap negatif dan cara dalam memperbaiki. Diantara faktor yang membuat sikap negatif atas Jamaah Ahmadiyah yaitu kebijakan negara lain kepada Ahmadiyah, keputusan dari pemerintah, fatwa yang hadir dari kelompok utama Islam-kelompok Islam *mainstream*, pernyataan para tokoh, penegakan hukum yang lemah, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Penelitian dari Saipul Hadi menjelaskan kompleksitas kekerasan yang dialami oleh Jamaah Ahmadiyah di era reformasi. Menurutnya kekerasan sudah muncul sejak 1988 Pasca Suharto, ketika kelompok keislaman seperti Front Pembela Islam (FPI) mulai mengklaim Ahmadiyah sebagai kelompok sesat. Penelitian ini berangkat dari hipotesisnya bahwa Ahmadiyah banyak menjadi target serangan kekerasan oleh kelompok Islam di era pasca Suharto.<sup>12</sup> Rofiqoh Zuchairiyah menyimpulkan bahwa kekerasan yang dialami jamaah Ahmadiyah karena doktrin di masyarakat dan kelompok keagamaan yang menganggap bahwa Ahmadiyah telah keluar dari ajaran Islam. Idealnya negara melindungi seluruh agama yang dianut masyarakat guna mewujudkan keadilan

---

<sup>9</sup> Uwes Fatoni, "RESPON DA'I TERHADAP GERAKAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI TENJOWARINGIN TASIKMALAYA," *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah* 15, no. 1 (2014): 49.

<sup>10</sup> Abdul Gaffar, "Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur Dan Lombok NTB," *The Sociology of Islam* 3, no. 2 (2013): 28.

<sup>11</sup> Lukman Nul Hakim, "TINDAK KEKERASAN TERHADAP JAMAHAH AHMADIYAH INDONESIA: SEBUAH KAJIAN PSIKOLOGI SOSIAL," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 2, no. 1 (June 2011): 18, <https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V2I1.435>.

<sup>12</sup> Saipul Hamdi, "Ahmadiyah Di Era Reformasi | Al-Ulum," *Jurnal Al- Ulum*, 2011.

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perspektif Fiqh Siyah perlindungan yang diberikan kepada Ahmadiyah dengan cara memberikan hak-hak yang sama dengan ummat beragama lain, hal ini karena tujuan Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta, agama, dan keturunan. Islam juga menekankan untuk berbuat baik serta hidup damai pada sesama manusia, sehingga kekerasan fisik ataupun psikis kepada Jamaah Ahmadiyah tidak dapat dibenarkan sama sekali dalam agama Islam.<sup>13</sup>

### **Kelompok Minoritas Keagamaan**

Ahmadiyah termasuk ke dalam kelompok keagamaan minoritas di berbagai daerah di Indonesia, dan sebagian dari mereka mengalami diskriminasi hingga kekerasan. Salah satu kelompok minoritas di Kota Tangerang Selatan yang sering mengalami kekerasan adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Bentuk kekerasan yang diterima terdiri dari dua bentuk kekerasan verbal dan non verbal. Bentuk kekerasan yang bersifat verbal seperti kata-kata sesat dan diluar Islam. Sedangkan kekerasan non verbal digambarkan seperti larangan membangun tempat ibadah, serta penolakan terhadap keberadaan Ahmadiyah. Kekerasan tersebut hadir dikarenakan adanya perilaku sosial yang terbentuk dari aktor dan budaya yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelompok yang anti Ahmadiyah masuk dalam ranah struktur dominasi, signifikansi, dan legitimasi. Beberapa praktik sosial tersebut membentuk rutinitas yang tidak kuasa diderutinisasi oleh Ahmadiyah yang membuatnya menjadi kelompok yang terdiskriminasi.<sup>14</sup>

Di dalam tulisannya, Husen menjelaskan kelompok minoritas dan mayoritas Islam, penelitian ini membahas dua hal diantaranya: *Pertama*, penolakan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yogyakarta terhadap praktik minoritas. *Kedua*, Kota Yogyakarta sebagai kota toleransi di dalam memfasilitasi dialog antar umat Islam. Sedangkan tulisan ini menyimpulkan bahwa perlawanan JAI adalah bagian dari respon minoritas yang dilakukan oleh komunitas maaistream Islam, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yogyakarta telah berhasil menggalang dukungan dari jaringan eksternal meliputi kelompok akademik dan organisasi masyarakat sipil.<sup>15</sup> Husen menekankan terkait pelaksanaan layanan pendidikan agama pada kelompok masyarakat minoritas yang meliputi bentuk dan jenis layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat

---

<sup>13</sup> Rofiqoh Zuchairiyah, "KEKERASAN TERHADAP PENGIKUT ALIRAN YANG DINILAI SESAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Ahmadiyah Di Indonesia)," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (May 2012): 369.

<sup>14</sup> Apriadi Richi Simamora, Abdul Hamid, and M Dian Hikmawan, "Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Di Tangerang Selatan," *Ijd-Demos* 1, no. 1 (2019): 19, <https://doi.org/10.37950/IJD.V1I1.4>.

<sup>15</sup> Dewi Nurul Maliki, "Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (July 2010): 47, <https://doi.org/10.22146/JSP.10948>.

minoritas. Selain itu, ia meneliti terkait hambatan pendirian serta harapan atas pendidikan bagi kelompok minoritas. Penelitian ini mengambil objek pada pendidikan agama di Tarutung, penelitian ini menjelaskan bahwa pendidikan agama di daerah tergantung kepada sejauh kreatifitas kelompok minoritas muslim dalam mengelola pelayanan pendidikan agama yang diselenggarakan oleh Ikatan Islam Tarutung dalam melaksanakan layanan pendidikan keagamaan seperti membaca, menulis, dan belajar sholat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>16</sup>

Negara Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai landasan dan dasar Negara, walaupun bukan Negara agama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dengan madzhab *Ablussunnah Wal Jamaah* (sunni). Walaupun didominasi oleh masyarakat sunni, beberapa aliran baru seperti Syiah dan Ahmadiyah yang mendapatkan label sesat dari MUI. Tidak jarang hubungan antara Sunni dan kelompok-kelompok tersebut menimbulkan konflik. Ramli menjelaskan lebih dalam terkait aliran-aliran minoritas yang dianggap sesat oleh MUI. Berdasarkan hasil observasi dan kajian dokumen ditemukan hasil bahwa jumlah pengikut yang banyak membuat MUI dan organisasi keislaman *mainstream* mendorong lahirnya fatwa keagamaan yang berisi tentang aliran dan paham menyimpang di Indonesia.<sup>17</sup>

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini berbicara tentang efektifitas fungsi media dalam mengurangi kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Indonesia. Fungsi media sebagai pengawasan (*surveillance*), penafsiran (*interpretation*), pertalian (*linkage*), penyebaran nilai-nilai (*Transmission of Value*), dan hiburan (*entertainment*) menjadi bagian dari sebuah keuntungan dalam melakukan dan mengontrol konteks berita yang beredar. Di dalam konteks Ahmadiyah fungsi media yang sepatutnya hadir yaitu sebagai pengawasan (*surveillance*), penafsiran (*interpretation*), pertalian (*linkage*), penyebaran nilai-nilai (*transmission of Value*), sedangkan fungsi media sebagai hiburan (*entertainment*) tidak nampak disebabkan kejadian yang menimpa Ahmadiyah adalah sesuatu yang memprihatinkan dan menimbulkan korban. Media yang bagus senantiasa mempertimbangkan fungsi-fungsi media dalam mengeluarkan ataupun membuat berita.

Penelitian menggunakan analisis teks (*content analysis*) dengan memakai pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua data utama, yakni: data primer dan data

---

<sup>16</sup> Husen Hasan Basri, "Pelayanan Pendidikan Keagamaan Pada Masyarakat Minoritas Di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 4, no. 4 (April 2006): 134, <https://doi.org/10.32729/EDUKASI.V4I4.145>.

<sup>17</sup> Ramli Abdul Wahid, "ALIRAN MINORITAS DALAM ISLAM DI INDONESIA," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (July 2018): 141–63.

sekunder. Data primer meliputi berita-berita yang tentang jamaah Ahmadiyah di media *online* Kompas.com dan Detik.com. Pemilihan dua media *online* tersebut karena beberapa argumen, diantaranya: media tersebut memiliki popularitas yang tinggi, serta memiliki media cetak-media sosial sehingga banyak dibaca oleh masyarakat luas. Selain itu, kedua media *online* tersebut selama ini tidak pernah terlibat dalam kesalahan fatal dalam pemberitaan sehingga terkait integritas dan akuntabilitasnya terjaga. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: setiap data dan sumber penunjang dari penelitian lain yang relevan untuk penelitian ini. Kedua sumber data yang ada diklasifikasi dan dipilah sesuai dengan respon dan naarasi berita yang ditampilkan. Proses penggalian data penelitian ini dilakukan melihat berita-berita yang dimuat dalam media *online* Kompas.com dan Detik.com pasca peristiwa Cikeusik, karena peristiwa tersebut menjadi awal mula masyarakat menyadari eksistensi Jamaah Ahmadiyah di Indonesia. Teknik pengumpulannya menggunakan *mapping literature* dan *grapping* data di dalam satu buah struktur yang sama. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pemilahan-klasifikasi data berdasarkan jenis diskriminasi-kekerasan yang diterima ahmadiyah. Akhirnya, data yang telah terkumpul dilihat menggunakan pendekatan fungsi media untuk melihat sejauhmana efektifitas media *online* dalam mengurangi diskriminasi dan kekerasan kepada Ahmadiyah melalui *platform* yang dimiliki.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Gerakan Ahmadiyah dimulai antara tahun 1920 secara langsung dalam bentuk embrio. Pada tahun tersebut Maulana Kwadja Kamaluddin yang merupakan tokoh Ahmadiyah India membawa misi Islam di Benua Eropa, datang ke kota Surabaya di perhimpunan *Tashwirul Afkar* di dalam peringatan maulid Nabi Muhammad yang berada di masjid Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan hingga tahun 1942, sehingga aktifitas Ahmadiyah baru mulai di pada tahun 1947.<sup>18</sup>

Pemberitaan kasus Ahmadiyah di media massa *online* senantiasa menjadi topik yang menarik serta mengundang antusiasme bagi pembaca. Dalam penelitian ini akan melihat lima kasus kekerasan yang diterima oleh Ahmadiyah di Indonesia pasca kejadian di Cikeusik dengan menggunakan perspektif media dari media *online* Kompas.com dan Detik.com. Hal ini tidak terlepas dari realitas konflik yang melingkupi jamaah Ahmadiyah yang disebabkan dari berbagai aspek, seperti: politik, ekonomi, sosial, ketidaktegasan pemerintah, peribadatan Ahmadiyah yang eksklusif, dan pengaruh dari pemberitaan media massa di Indonesia.<sup>19</sup> Berikut adalah hasil pencarian

---

<sup>18</sup> Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2011). 14.

<sup>19</sup> Muhamad Zuldin, "KONFLIK AGAMA DAN PENYELESAIANNYA: Kasus Ahmadiyah Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 37, no. 2 (April 2016): 438, <https://doi.org/10.30821/MIQOT.V37I2.91>.

yang dibatasi pada bulan September 2021, berdasarkan tema pemberitaan berdasarkan hasil pemberitaan untuk Ahmadiyah di media *online* Detik.com:

a. Perusakan Tempat Ibadah berupa Masjid Ahmadiyah

Isu terkait perusakan tempat ibadah adalah isu yang paling banyak diangkat serta dijadikan *headline* media *online* Detik.com isu perusakan Masjid Ahmadiyah juga menjadi topik yang sering ditanggapi oleh tokoh, ormas, NGO, hingga partai politik. Dalam bingkai Detik.com beberapa yang memberikan tanggapan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), Komnas HAM, Menteri Agama, GMNI, dan masih banyak lagi. Mereka banyak mengkritisi dan menghendaki adanya kajian ulang terhadap SKB 3 menteri tentang Ahmadiyah.

b. Kebijakan Pemerintah: SKB 3 Menteri-Fatwa MUI

Sebagaimana dengan *headline* terkait perusakan masjid dan tempat ibadah milik jamaah Ahmadiyah, *headline* yang membicarakan tentang SKB ini juga banyak bersliweran. Hal ini tidak terlepas dari kontroversi SKB 3 Menteri, beberapa pihak menilai keberadaannya menjadi pintu masuk dari diskriminasi yang diterima oleh Ahmadiyah. Sehingga kemudian, setiap ada kejadian terkait Ahmadiyah senantiasa dikaitkan dengan peraturan yang tertera di SKB 3 Menteri.

c. Kurangnya Keberpihakan Pemangku Kebijakan Kemenag-Aparat

Selain dari segi peraturan dalam SKB 3 Menteri, yang juga bertanggungjawab adalah pemangku kebijakan. Pemerintah, dalam hal ini adalah aparat dianggap kurang tegas kepada pelaku kekerasan dan perusah tempat ibadah jamaah Ahmadiyah. Pemerintah juga dianggap kurang responsif terhadap revisi dan perbaikan dari peraturan yang ada, guna melindungi hak-hak dari kelompok minoritas seperti Ahmadiyah.

d. Empati Ormas seperti PBNU-MUI

Diskriminasi dan kekerasan yang diterima oleh Ahmadiyah membuat beberapa kelompok menjadi empati dan memberikan dukungan mereka. Kelompok-kelompok ini memberikan dukungan seperti tempat tinggal sementara, bantuan logistik, hingga mendukung advosi kepada Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas.

e. Pengkaitan sebagai aliran sesat di beberapa daerah

Walaupun berbagai bentuk dukungan dan advokasi, tetapi stigma kelompok ahmadiyah sebagai aliran “sesat” masih sangat sulit. Kelompok masyarakat masih menghidupi stigma sesat, stigma ini bahkan sudah sudah mendarah daging dimasyarakat tertentu yang membuat kelompok Ahmadiyah semakin teralienasi dari kelompok masyarakat.

Tema pemberitaan berdasarkan hasil pemberitaan untuk Ahmadiyah di media Kompas.com:

a. Perusakan Tempat Ibadah/MasjidAhmadiyah

Tidak berbeda jauh dari berita yang ada di Kompas.com, *headline* di media Kompas.com tertinggi membahas tentang perusakan tempat ibadah masjid. Hal ini menunjukkan bahwa kasus pengrusakan masjid Ahmadiyah memang menjadi pembahasan dan kasus yang banyak disorot oleh media massa. Pengrusakan ini terjadi di berbagai daerah, dan terbukti masih menarik banyak pembaca.

b. Kebijakan pemerintah: SKB 3 Menteri-Fatwa MUI

Sebagaimana dengan *bedline* terkait perusakan masjid dan tempat ibadah milik jamaah Ahmadiyah, *headline* yang membicarakan tentang SKB ini juga banyak bersliweran. Hal ini tidak terlepas dari kontroversi SKB 3 Menteri, beberapa pihak menilai ia menjadi pintu masuk dari diskriminasi yang diterima oleh Ahmadiyah. Sehingga kemudian, setiap ada kejadian terkait Ahmadiyah senantiasa dikaitkan dengan peraturan yang termaktub di SKB 3 Menteri.

c. Kurangnya Keberpihakan Pemangku Kebijakan Kemenag-Aparat

Selain dari segi peraturan dalam SKB 3 Menteri, yang juga bertanggungjawab adalah pemangku kebijakan. Pemerintah, dalam hal ini adalah aparat dianggap kurang tegas kepada pelaku kekerasan dan perusah tempat ibadah jamaah Ahmadiyah. Pemerintah juga dianggap kurang responsif terhadap revisi dan perbaikan dari peraturan yang ada, guna melindungi hak-hak dari kelompok Ahmadiyah.

d. Empati Ormas seperti PBNU-MUI

Diskriminasi dan kekerasan yang diterima oleh Ahmadiyah membuat beberapa kelompok menjadi empati dan memberikan dukungan mereka. Kelompok-kelompok ini memberikan dukungan seperti tempat tinggal sementara, bantuan logistik, hingga mendukung advosi kepada Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas.

e. Pengkaitan sebagai Aliran Sesat di beberapa daerah

Walaupun berbagai bentuk dukungan dan advokasi, tetapi stigma kelompok ahmadiyah sebagai aliran “sesat” masih sangat sulit. Kelompok masyarakat masih menghidupi stigma sesat, stigma ini bahkan sudah sudah mendarah daging dimasyarakat tertentu yang membuat kelompok Ahmadiyah kian teralienasi dari kelompok masyarakat.

f. Hak-Hak Minoritas: Pendidikan, Tempat Tinggal, dan E-KTP

Salah satu hal yang khas dari hasil pemberitaan di Kompas adalah memberitakan tentang pemenuhan hak-hak minoritas. Ada beberapa berita dalam menjelaskan terkait pemenuhan hak minoritas seperti pendidikan bagi anak ataupun usia belajar bagi kelompok Ahmadiyah, pemberian tempat tinggal atau tempat mengungsi bagi korban perusakan rumah tinggal, dan pencantuman agama di E KTP yang masih simpang siur dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Selain pembahasan yang telah disampaikan di atas, pemberitaan terkait Ahmadiyah sangat beragam, salah satu diantaranya terkait kesalahpahaman tentang *khilafah* dalam konsep Ahmadiyah. Berbeda sekali dengan konsep khilafah ala Hisbut Tahrir dan ISIS yang masih memiliki kesamaan. Dalam konteks ini, khilafah menurut Ahmadiyah memiliki nilai dan orientasi sendiri yaitu khilafah sebagai sistem spiritual asketis. Akan tetapi khilafah dari Hisbut Tahrir dan ISIS mendapatkan menimbulkan dialektika dan wacana di tengah masyarakat, sedangkan khilafah yang difahami Ahmadiyah masih sepi dari perbincangan publik.<sup>20</sup>

## MEDIA DAN JAMAAH AHMADIYAH

Beberapa penelitian telah menyoroti pemberitaan media massa *online* terhadap Ahmadiyah, dan menghasilkan kesimpulan bahwa Jamaah Ahmadiyah di dalam beberapa pemberitaan ditampilkan secara tidak adil secara wacana yang mengarah pada ketidakadilan dan diskriminasi.<sup>21</sup> Data dari Detik.com dan Kompas.com yang terkumpul akan digunakan untuk melihat dari perspektif lima fungsi media meliputi pengawasan (*surveillance*), penafsiran (*interpretation*), Pertalian (*linkage*), penyebaran nilai-nilai (*transmission of value*), dan hiburan (*entertainment*).

### a. Pengawasan (*surveillance*)

Pada fungsi ini, media menjadi pengawas dari adanya ketimpangan ataupun kondisi sosial di masyarakat. Kedua media di atas telah melakukan fungsi pengawasan dalam kasus Ahmadiyah,

---

<sup>20</sup> Abd.Aziz Faiz, *Khilafah Ahmadiyah Dan Nation State* (Yogyakarta: ISAI, 2019). 4.

<sup>21</sup> Wulan Purnama Sari and Analisis Wacana Kritis Kasus Penyerangan Terhadap Jamaah Ahmadiyah, “Analisis Wacana Kritis Kasus Penyerangan Terhadap Jamaah Ahmadiyah Di Cikeusik,” *Jurnal Komunikasi* 10, no. 1 (July 2018): 87.

dengan memberitakan setiap kejadian yang menimpa ataupun dialami oleh kelompok tersebut. Salah satu hal yang belum termaskimalkan dari fungsi pengawasan adalah pemantauan dalam ketuntasan sebuah kejadian yang menimpa Ahmadiyah, sebagian besar berita hanya memberitakan ketika kejadian berlangsung tetapi ketuntasan sebuah kasus kurang mendapatkan pengawalan dan pengawasan dari kedua media: Detik.com dan Kompas.com.

**b. Penafsiran (*interpretation*)**

Sebagai bagian dari media yang memberikan penjelasan dari situasi yang sedang terjadi, dan memberikan penafsiran yang berlandaskan pada realita yang terjadi di lapangan. Penafsiran ini juga harus berdasarkan asas akuntabilitas sehingga tidak terkesan membesar-besarkan masalah atau kejadian yang ada. Berita yang disajikan harus berimbang dan tidak terkesan berat sebelah atau mendramatisir kejadian demi kepentingan *clickbait*.

**c. Pertalian (*linkage*)**

Pemberitaan dalam kaitannya dengan pemberitaan tersebut dapat dilihat sebagai bagian sebuah tanggung jawab media untuk mengawal kejadian yang ada di masyarakat. Pertalian ini memberikan jaringan dan trend dari sebuah kasus yang menimpa Jamaah Ahmadiyah. Pertalian ini mengikat dan memberikan gambaran kepada media dalam melihat alur di setiap kasus.

**d. Penyebaran nilai-nilai (*transmission of value*)**

Inti dari pemberitaan dari Jamaah Ahmadiyah di Indonesia yaitu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menegetahui, memahami, dan mengambil pesan dari kejadian yang ada. Sehingga salah satu tujuan utama dalam pemberitaan Ahmadiyah yaitu melawan stigma negatif yang ditujukan kepada Ahmadiyah dan menyebarkan semangat bina damai di tengah keragaman Bangsa Indonesia.

**e. Hiburan (*entertainment*)**

Pada kasus pemberitaan Ahmadiyah fungsi media sebagai hiburan tidak berlaku secara maksimal. Salah satu argumentasinya karena memang kejadian ini bersifat informatif serta tanpa adanya unsur hiburan sama sekali. Secara makna fungsi menghibur ini dapat dijadikan sebagai bagian dari penambahan informasi yang dapat memberrikan tambahan pengetahuan sehingga menimbulkan rasa kewaspadaan ataupun tanggung jawab dalam menjaga perdamaian.

Pemberitaan dari media terkait kekerasan yang didapatkan kelompok Ahmadiyah terbagi menjadi dua: memberitakan realitas yang ada di masyarakat dalam permasalahan sosial kemasyarakatan dan sebatas menyampaikn informasi tanpa pertimbangan dalam membangun

bina damai. Keberadaan media belum memberikan manfaat positif dalam menanggulangi kekerasan dan diskriminasi kepada kelompok Ahmadiyah. Respon media massa melalui pemberitaan selajaknya disajikan secara proporsional, realitasnya beberapa media masih terjebak dalam ideologi yang mengiring pembaca pada sebuah kesimpulan tertentu.<sup>22</sup>

Kegagalan media memberikan pesan dan informasi bina damai disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: kurang memaksimalkan peran media sebagai penyampai pesan positif, media masih sebatas pada pemberian informasi, dan media masih terjebak pada penggunaan *clickbait* semata. Beberapa hal tersebut harus diperbaiki dan dimaksimalkan guna memberikan dampak positif dari keberadaan media di tengah masyarakat saat ini.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam menaikkan kualitas media sebagai agen bina damai meliputi: SDM yang memahami dan mampu memaknai konsep bina damai, integrasi media dalam memberitakan informasi yang berimbang dan independensi media dalam pemberitaan serta ikut menjadi pengawal penuntasan kasus yang menimpa korban jamaah Ahmadiyah dimanapun berada. Ketika beberapa hal tersebut dilakukan, harapan dalam pembangunan media sebagai agen perdamaian menjadi lebih realistis dan mudah diwujudkan.

#### **MEDIA MASSA: AGEN PERDAMAIAN DI ERA 4.0**

Keberadaan Ahmadiyah dalam kegiatan revolusi kemerdekaan serta kebangsaan senantiasa diabaikan, salah satu contohnya adalah W.R. Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya ataupun Arif Rahman, yang merupakan tokoh dengan gelar Pahlawan Ampera.<sup>23</sup> Akan tetapi, anggapan kesesatan yang dilabelkan kepada Ahmadiyah membuat kiprah lembaga ataupun tokoh Ahmadiyah menjadi hilang dari peredaran. Walaupun sesungguhnya ajaran pokok Ahmadiyah tidak berbeda dari ajaran yang dianut oleh umat Islam secara umum. Secara umum pembahasan terkait Ahmadiyah berkaitan dengan permasalahan *kebatam al-anbiya la nabiyya ba'dah* dan Allah masih menurunkan firmanNya kepada wali-walinya.<sup>24</sup>

Agen merupakan aktor dan tokoh penting dalam memberikan dan melancarkan sebuah kebijakan. Dari sini, setiap hal harus memiliki agen sebagai motor penggerak dan pelaksana kebijakan guna menjalankan sebuah misi. Media dapat menjadi motor dan agen bagi kebijakan dan menjalankan bina damai, dalam konteks Indonesia sekarang ini. Media ketika memahami fungsi dan tugasnya, maka fungsi dan peran media sebagai agen bina damai tidak akan sulit untuk

---

<sup>22</sup> Nursatyo, "DOMINASI IDEOLOGI MEDIA DALAM PROSES PRODUKSI BERITA KASUS AHMADIYAH CIKEUSIK TAHUN 2011 DI MAJALAH TEMPO," *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 40, no. 56 (July 2018): 6536.

<sup>23</sup> Muhammad Said, *Jemaat Ahmadiyah Indonesia: Konflik, Kebangsaan, Dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: ISAI, 2018). xiv.

<sup>24</sup> Dkk, *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer*. 194.

direalisasikan. Sehingga berbagai bentuk stigmatisasi, persekusi, diskriminasi dan tindak kekerasan lainnya dapat diminimalisir. Tindakan kurang terpuji tersebut hadir sebagai salah satu reaksi masyarakat yang tidak dapat menerima kehadiran Jamaah Ahmadiyah di lingkungannya.<sup>25</sup> Saat ini media hanya terlihat memediatisasi sehingga peran dan fungsinya sebagai agen perdamaian masih sangat jauh. Optimalisasi peranan inilah yang akan menjadi salah tugas media dalam konteks kekerasan yang dialami oleh jamaah Ahmadiyah.

Jamaah Ahmadiyah yang senantiasa digambarkan sebagai korban selama ini, sudah selayaknya mendapatkan advokasi dari media melalui fungsi yang dimiliki. Sehingga kehadiran pemberitaan dari media terkait jamaah Ahmadiyah juga memberikan manfaat dan efek positif bagi mereka. Ahmadiyah selayaknya diposisikan sebagai kelompok yang perlu bantuan dan perlindungan, media dapat memberikan penekanan dengan bantuan berupa pemberitaan yang memberikan pesan perdamaian dan tidak terbelenggu pada *clickbait* dan *exposure* pemberitaan semata.

## **PENUTUP**

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa antara pemberitaan di Detik.com dan Kompas.com memiliki garis merah. Keduanya memberitakan dengan benang merah bahwa dalam pemberitaan memang lebih banyak membicarakan diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh Ahmadiyah. Diskriminasi dan kekerasan yang disorot memiliki level yang berbeda-beda dari kekerasan dengan memberikan label “sesat” hingga kekerasan langsung seperti tindakan dan perilaku kekerasan.

Tema pemberitaan berdasarkan hasil pemberitaan untuk Ahmadiyah di media Detik.com: merusak tempat ibadah-masjid Ahmadiyah, kebijakan pemerintah: SKB 3 Menteri-Fatwa MUI, kurangnya keberpihakan pemangku kebijakan Kemenag-aparat, empati ormas seperti PBNU-MUI dan pengkaitan sebagai aliran sesat di beberapa daerah. Sedangkan, tema pemberitaan berdasarkan hasil pemberitaan untuk Ahmadiyah di media Kompas.com: merusak tempat ibadah-masjid Ahmadiyah, kebijakan pemerintah: SKB 3 Menteri-Fatwa MUI, kurangnya keberpihakan pemangku kebijakan Kemenag-aparat, empati ormas seperti PBNU-MUI, pengkaitan sebagai aliran sesat di beberapa daerah, dan hak-hak minoritas: pendidikan, tempat tinggal, serta permasalahan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

---

<sup>25</sup> Tesa Amyata Putri, Soni Akhmad Nulhaqim, and Muhammad Fedryansyah, “ANALISA KONFLIK AHMADIYAH DI SUKABUMI DALAM PEBERITAAN MEDIA MASSA RENTANG TAHUN 2008-2020,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 2 (August 2021): 189.

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa pemberitaan media terkait diskriminasi dan kekerasan tidak memberikan dampak pada menurunnya kasus kekerasan terhadap kelompok tersebut. Pemberitaan yang ada di media tersebut berdasarkan penelitian ini karena sebatas *headline* ataupun *thumbnail* semata. Fungsi media sebagai penyaring dan media motivasi belum dimaksimalkan, dan masih sebatas media informasi semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Muhammad. "AHMADIYAH AND THE FREEDOM OF RELIGION IN INDONESIA." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 3, no. 2 (December 2009): 390. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.2.390-413>.
- Aula, Siti Khodijah Nurul. "Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 1 (2020): 125–48.
- Basri, Husen Hasan. "Pelayanan Pendidikan Keagamaan Pada Masyarakat Minoritas Di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 4, no. 4 (April 2006): 134. <https://doi.org/10.32729/EDUKASI.V4I4.145>.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi, Komunikasi Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- CNN Indonesia. "Deretan Penyerangan Terhadap Ahmadiyah, Cikeusik Hingga NTB," 2021.
- Dkk, Machasin. *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer*. Edited by Muhammad Wildan. Yogyakarta: Tim Adab Press, 2020.
- Faiz, Abd.Aziz. *Khilafah Ahmadiyah Dan Nation State*. Yogyakarta: ISAI, 2019.
- Fatoni, Uwes. "RESPON DA'I TERHADAP GERAKAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI TENJOWARINGIN TASIKMALAYA." *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah* 15, no. 1 (2014): 49.
- Gaffar, Abdul. "Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur Dan Lombok NTB." *The Sociology of Islam* 3, no. 2 (2013): 28.
- Hakim, Lukman Nul. "TINDAK KEKERASAN TERHADAP JAMA'AH AHMADIYAH INDONESIA: SEBUAH KAJIAN PSIKOLOGI SOSIAL." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 2, no. 1 (June 2011): 18. <https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V2I1.435>.
- Hamdi, Saipul. "Ahmadiyah Di Era Reformasi | Al-Ulum." *Jurnal Al- Ulum*, 2011.
- Khodijah, Siti. "Lembaran Akomodasi Dan Intoleransi: Relasi Antar Iman Dalam Literatur Keislaman Di Indonesia." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2019): 323. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2018.0202-10>.
- Maliki, Dewi Nurul. "Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (July 2010): 47. <https://doi.org/10.22146/JSP.10948>.
- Nursatyo. "DOMINASI IDEOLOGI MEDIA DALAM PROSES PRODUKSI BERITA KASUS AHMADIYAH CIKEUSIK TAHUN 2011 DI MAJALAH TEMPO." *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 40, no. 56 (July 2018): 6536.
- Purnama Sari, Wulan, and Analisis Wacana Kritis Kasus Penyerangan Terhadap Jemaat Ahmadiyah. "Analisis Wacana Kritis Kasus Penyerangan Terhadap Jemaat Ahmadiyah Di Cikeusik." *Jurnal Komunikasi* 10, no. 1 (July 2018): 87.
- Putri, Tesa Amyata, Soni Akhmad Nulhaqim, and Muhammad Fedryansyah. "ANALISA KONFLIK AHMADIYAH DI SUKABUMI DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA RENTANG TAHUN 2008-2020." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 2 (August 2021): 189.
- Ropi, Ismatu. "Islamism, Government Regulation, and the Ahmadiyah Controversies in Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 48, no. 2 (December 2010): 281. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2010.482.281-320>.
- Said, Muhammad. *Jemaat Ahmadiyah Indonesia: Konflik, Kebangsaan, Dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: ISAI, 2018.
- Simamora, Apriadi Richi, Abdul Hamid, and M Dian Hikmawan. "Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Di Tangerang Selatan." *Ijd-Demos* 1, no. 1 (2019): 19. <https://doi.org/10.37950/IJD.V1I1.4>.

- Wahid, Ramli Abdul. "ALIRAN MINORITAS DALAM ISLAM DI INDONESIA." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (July 2018): 141–63.
- Zuchairiyah, Rofiqoh. "KEKERASAN TERHADAP PENGIKUT ALIRAN YANG DINILAI SESAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Ahmadiyah Di Indonesia)." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (May 2012): 369.
- Zuldin, Muhamad. "KONFLIK AGAMA DAN PENYELESAIANNYA: Kasus Ahmadiyah Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 37, no. 2 (April 2016): 438. <https://doi.org/10.30821/MIQOT.V37I2.91>.
- Zulkarnain, Iskandar. *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2011.